



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);

26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara yang memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.

BAB II
RINCIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp920.963.347.048,00 berkurang sebesar Rp54.725.596.941,00 sehingga menjadi Rp866.237.750.107,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp900.963.347.048,00
2. berkurang	<u>Rp(92.681.728.231,53)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp808.281.618.816,47
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp912.947.347.048,00
2. berkurang	<u>Rp(54.725.596.941,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp858.221.750.107,00
Surplus/(Devisit)	Rp(49.940.131.290,53)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) semula	Rp11.984.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp37.956.131.290,53</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp49.940.131.290,53

2. Pengeluaran

2. Pengeluaran	
a) semula	Rp8.016.000.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp8.016.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp49.940.131.290,53

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00

(2) Uraian Lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar pinjaman Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. semula	Rp165.912.950.480,00
2. berkurang	<u>Rp(22.973.621.877,00)</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp142.939.328.603,00

b. Dana perimbangan

1. semula	Rp623.353.553.000,00
2. berkurang	<u>Rp(62.841.392.000,00)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp560.512.161.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula	Rp111.696.843.568,00
2. berkurang	<u>Rp(6.866.714.354,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp104.830.129.213,47

(2) Pendapatan

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1. semula Rp40.242.500.000,00
 - 2. berkurang Rp(6.951.334.000,00)
 - jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp33.291.166.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1. semula Rp8.972.510.065,00
 - 2. berkurang Rp(1.678.321.753,00)
 - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp7.294.188.312,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. semula Rp7.694.535.351,00
 - 2. bertambah Rp976.010.085,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8.670.545.436,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. semula Rp109.003.405.064,00
 - 2. berkurang Rp(15.319.976.209,00)
 - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp93.683.428.855,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
 - 1. semula Rp15.937.202.000,00
 - 2. bertambah Rp 1.510.862.000,00
 - jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp17.448.064.000,00
 - b. Dana alokasi umum
 - 1. semula Rp486.224.602.000,00
 - 2. berkurang Rp(46.516.291.000,00)
 - jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp439.708.311.000,00
 - c. Dana alokasi khusus
 - 1. semula Rp121.191.749.000,00
 - 2. berkurang Rp(17.835.963.000,00)
 - jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp103.355.786.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 - 1. semula Rp27.237.840.000,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - jumlah hibah setelah perubahan Rp27.237.840.000,00
 - b. Dana darurat
 - 1. semula Rp 0,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp 0,00
 - jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Dana.....

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
1. semula	Rp76.577.853.568,00
2. berkurang	<u>Rp(8.366.714.354,53)</u>
jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp68.211.139.213,47
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1. semula	Rp7.881.150.000,00
2. bertambah	<u>Rp500.000.000,00</u>
jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp8.381.150.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	
1. semula	Rp354.166.657.081,00
2. bertambah	<u>Rp3.366.033.000,00</u>
jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp357.532.960.981,00
b. Belanja Langsung	
1. semula	Rp558.780.689.967,00
2. berkurang	<u>Rp(58.091.629.941,00)</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp500.689.060.026,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp330.543.626.177,00
2. berkurang	<u>Rp(930.367.000,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp357.532.690.081,00
b. Belanja bunga	
1. semula	Rp2.500.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp2.500.000.000,00
c. Belanja subsidi	
1. semula	Rp 0,00
2. berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00
d. Belanja Hibah	
1. semula	Rp14.391.400.000,00
2. berkurang	<u>Rp(3.903.600.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp10.487.800.000,00
e. Belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp4.852.500.000,00
2. berkurang	<u>Rp(2.000.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp2.852.500.000,00

f. belanja

f. Belanja bagi hasil		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1. semula	Rp	879.130.904,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	879.130.904,00
h. Belanja tidak terduga		
1. semula	Rp	1.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.200.000.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	11.200.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1. semula	Rp	27.134.717.700,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(755.578.487,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	26.379.139.213,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp	368.584.526.552,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(36.981.100.081,00)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	331.603.426.471,00
c. Belanja modal		
1. semula	Rp	163.061.445.715,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(20.354.951.373,00)</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	142.706.494.342,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :		
a. Penerimaan pembiayaan		
1. semula	Rp	20.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>37.956.131.290,53</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	57.956.131.290,53
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. semula	Rp	8.016.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	8.016.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1. semula	Rp	20.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>37.956.131.290,53</u>
jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	57.956.131.290,53
b. Pencairan dana cadangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

c.Hasil

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1. semula	Rp	5.250.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan	Rp	5.250.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1. semula	Rp	2.766.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	2.766.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana landasan operasional diatur dalam Peraturan Walikota.		

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 Oktober 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.007.110.20

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1-2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	900.963.347.048,00	808.281.618.816,47	(92.681.728.231,53)	(10,29)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	165.912.950.480,00	142.939.328.603,00	(22.973.621.877,00)	(13,85)
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	40.242.500.000,00	33.291.166.000,00	(6.951.334.000,00)	(17,27)
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.972.510.065,00	7.294.188.312,00	(1.678.321.753,00)	(18,71)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.594.535.351,00	8.670.545.436,00	976.010.085,00	12,68
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.003.405.064,00	93.683.428.855,00	(15.319.976.209,00)	(14,05)
4.2.	Dana Perimbangan	623.353.553.000,00	560.512.161.000,00	(62.841.392.000,00)	(10,08)
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.937.202.000,00	17.448.064.000,00	1.510.862.000,00	9,48
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	486.224.602.000,00	439.708.311.000,00	(46.516.291.000,00)	(9,57)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	121.191.749.000,00	103.355.786.000,00	(17.835.963.000,00)	(14,72)
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	111.696.843.568,00	104.830.129.213,47	(6.866.714.354,53)	(6,15)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	27.237.840.000,00	27.237.840.000,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	76.577.853.568,00	68.211.139.213,47	(8.366.714.354,53)	(10,93)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
4.3.5.	Bantuan keuangan	7.881.150.000,00	8.381.150.000,00	500.000.000,00	6,34
	JUMLAH PENDAPATAN	900.963.347.048,00	808.281.618.816,47	(92.681.728.231,53)	(10,29)
5.	BELANJA DAERAH	912.947.347.048,00	858.221.750.107,00	(54.725.596.941,00)	(5,99)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	354.166.657.081,00	357.532.690.081,00	3.366.033.000,00	0,95
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	330.543.626.177,00	329.613.259.177,00	(930.367.000,00)	(0,28)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
5.1.4.	BELANJA HIBAH	14.391.400.000,00	10.487.800.000,00	(3.903.600.000,00)	(27,12)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4.852.500.000,00	2.852.500.000,00	(2.000.000.000,00)	(41,22)
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	879.130.904,00	879.130.904,00		
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	11.200.000.000,00	10.200.000.000,00	1.020,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	558.780.689.967,00	500.689.060.026,00	(58.091.629.941,00)	(10,40)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.134.717.700,00	26.379.139.213,00	(755.578.487,00)	(2,78)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	368.684.526.552,00	331.603.426.471,00	(36.981.100.081,00)	(10,03)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.	BELANJA MODAL	163.061.445.715,00	142.706.494.342,00	(20.354.951.373,00)	(12,48)
	JUMLAH BELANJA	912.947.347.048,00	858.221.750.107,00	(54.725.596.941,00)	(5,99)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.984.000.000,00)	(49.940.131.290,53)	(37.956.131.290,53)	316,72
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	11.984.000.000,00	49.940.131.290,53	37.956.131.290,53	316,72
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.000.000.000,00	57.956.131.290,53	37.956.131.290,53	189,78
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	57.956.131.290,53	37.956.131.290,53	189,78
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	57.956.131.290,53	37.956.131.290,53	189,78
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.016.000.000,00	8.016.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00		
6.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.766.000.000,00	2.766.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.016.000.000,00	8.016.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	11.984.000.000,00	49.940.131.290,53	37.956.131.290,53	316,72
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja							
		Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah/ (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Rp	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	104.577.365.634,00	88.791.117.737,00	(15.786.247.897,00)	15,10	228.679.957.875,00	338.421.547.151,00	567.101.505.026,00	226.794.506.177,00	303.908.567.352,00	530.703.073.529,00	398.431.497,00	(6,42)
1.01.	PENDIDIKAN	32.000.000,00	32.000.000,00			159.203.832.475,00		159.203.832.475,00	156.885.817.177,00		156.885.817.177,00	318.015.298,00	(1,46)
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.000.000,00	32.000.000,00			59.203.832.475,00	51.500.431.500,00	10.704.253.975,00	56.885.817.177,00	45.686.212.737,00	02.582.029.914,00	122.234.061,00	(3,95)
1.02.	KESEHATAN	103.084.865.634,00	87.294.617.737,00	(15.790.247.897,00)	15,32	53.886.509.300,00		53.886.509.300,00	53.514.253.010,00		53.514.253.010,00	372.266.300,00	(0,69)
1.02.01	DINAS KESEHATAN	12.955.359.114,00	12.191.679.114,00	(763.680.000,00)	(5,89)	27.514.429.300,00	71.568.548.000,00	99.082.977.300,00	27.475.036.000,00	70.004.345.969,00	97.479.381.969,00	603.565.331,00	(1,62)
1.02.02	RSUD A. MAKASSAU	90.129.506.520,00	75.102.938.623,00	(15.026.567.897,00)	(16,67)	26.372.080.000,00	103.812.190.320,00	30.184.270.320,00	26.039.217.000,00	93.773.153.694,00	19.812.370.694,00	371.899.626,00	(7,97)
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00			4.596.831.500,00		4.596.831.500,00	4.510.130.000,00		4.510.130.000,00	86.701.500,00	(1,98)
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00			4.596.831.500,00	68.629.733.000,00	73.226.564.500,00	4.510.130.000,00	56.674.296.851,00	61.184.426.851,00	642.137.649,00	(16,45)
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					2.687.588.600,00		2.687.588.600,00	2.989.898.010,00		2.989.898.010,00	302.309.400,00	11,25
1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					2.687.588.600,00	23.556.410.000,00	26.243.998.600,00	2.989.898.010,00	19.671.804.575,00	22.661.702.575,00	582.296.025,00	(13,55)
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.500.000,00	14.500.000,00	4.000.000,00	38,10	6.729.810.300,00		6.729.810.300,00	7.144.626.000,00		7.144.626.000,00	414.815.700,00	6,16
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					3.281.574.100,00	3.857.514.811,00	7.138.088.911,00	3.499.483.000,00	3.477.282.061,00	6.976.745.061,00	182.343.850,00	(2,27)

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
4.09.	PERBATASAN												
4.10.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					1.449.035.700,00		1.449.035.700,00	1.364.114.000,00		1.364.114.000,00	(84.921.700,00)	(5,86)
4.10.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					1.449.035.700,00	1.967.300.000,00	3.416.335.700,00	1.364.114.000,00	1.506.700.000,00	2.870.814.000,00	545.521.700,00	15,67
5.	URUSAN PENDUKUNG					20.920.673.900,00	74.466.113.800,00	95.386.784.700,00	22.325.985.700,00	75.011.002.015,00	97.336.987.715,00	950.203.015,00	2,04
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH					8.136.834.800,00		8.136.834.800,00	8.511.698.000,00		8.511.698.000,00	374.863.200,00	4,81
5.01.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH					786.998.000,00		786.998.000,00	756.998.000,00		756.998.000,00	(30.000.000,00)	(3,81)
5.01.02	SEKRETARIAT DAERAH KOTA					7.349.838.800,00	44.271.295.000,00	51.621.131.800,00	7.754.700.000,00	45.237.060.265,00	52.991.760.265,00	370.628.465,00	2,66
5.02.	SEKRETARIAT DPRD					12.783.836.100,00		12.783.836.100,00	13.814.287.700,00		13.814.287.700,00	1.030.451.600,00	8,06
5.02.01	SEKRETARIAT DPRD					12.783.836.100,00	30.194.818.800,00	42.978.654.900,00	13.814.287.700,00	29.773.941.750,00	43.588.229.450,00	609.574.550,00	1,42
	JUMLAH	900.963.347.048,00	108.281.618.816,47	79.244.965.864,47	10,29	54.166.657.081,00	58.780.689.967,00	112.947.347.048,00	357.532.890.081,00	400.689.060.026,00	58.221.750.107,00	725.596.941,00	15,99

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL 20 OKTOBER 2020

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hal 1 dari 43

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	210.704.263.975,00	202.582.029.914,00	(8.122.234.061,00)	(3,85)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	159.203.832.475,00	156.885.817.177,00	(2.318.015.298,00)	(1,46)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	159.203.832.475,00	156.885.817.177,00	(2.318.015.298,00)	(1,46)	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	Belanja Langsung	51.500.431.500,00	45.696.212.737,00	(5.804.218.763,00)	(11,27)	
1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.691.042.500,00	1.461.102.500,00	(229.940.000,00)	(13,60)	
1.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	230.000.000,00	240.000.000,00	10.000.000,00	4,35	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.000.000,00	240.000.000,00	10.000.000,00	4,35	
1.01.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	340.102.500,00	338.102.500,00	(2.000.000,00)	(0,59)	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	338.400.000,00	336.400.000,00	(2.000.000,00)	(0,59)	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.702.500,00	1.702.500,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	67.200.000,00	124.260.000,00	57.060.000,00	84,91	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.200.000,00	124.260.000,00	57.060.000,00	84,91	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.1.01.01.16.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00		(3.550.000,00)	(100,00)	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.450.000,00		(16.450.000,00)	(100,00)	
2.16.01.16.46.	PELATIHAN TENAGA PENDIDIK PADA BIDANG SENI DAN BUDAYA	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	3.450.000,00	950.000,00	38,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	41.550.000,00	29.050.000,00	232,40	
2.16.01.16.47.	PELAKSANAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00		(2.750.000,00)	(100,00)	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.250.000,00		(47.250.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	210.704.263.975,00	202.582.029.914,00	(8.122.234.061,00)	(3,85)	
	Surplus/(Defisit)	(210.672.263.975,00)	(202.550.029.914,00)	8.122.234.061,00	(3,86)	

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 : TAHUN 2020
 TANGGAL 02 OKTOBER 2020

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Hal 1 dari 221

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.701.591.700,00	25.044.916.561,00	21.753.923.239,00	51.500.431.500,00	2.634.801.013,00	21.170.381.962,00	21.891.029.762,00	45.696.212.737,00	(5.804.218.763,00)	(11,27)
1.01.	PENDIDIKAN	4.642.241.700,00	24.799.265.561,00	18.153.923.239,00	47.595.431.500,00	2.580.351.013,00	21.004.831.962,00	18.391.029.762,00	41.976.212.737,00	(5.619.218.763,00)	(11,81)
1.01.1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338.400.000,00	1.352.642.500,00		1.691.042.500,00	336.400.000,00	1.124.702.500,00		1.461.102.500,00	(229.940.000,00)	(13,60)
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan jasa surat menyurat		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		230.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	10.000.000,00	4,35
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	338.400.000,00	1.702.500,00		340.102.500,00	336.400.000,00	1.702.500,00		338.102.500,00	(2.000.000,00)	(0,59)
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor		67.200.000,00		67.200.000,00		124.260.000,00		124.260.000,00	57.060.000,00	84,91
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		55.000.000,00		55.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	20.000.000,00	36,36
1.01.1.01.01.01.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		335.000.000,00		335.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00	(100.000.000,00)	(29,85)
1.01.1.01.01.01.00	Penyediaan Administrasi Kegiatan UPTD Dinas Pendidikan		150.000.000,00		150.000.000,00					(150.000.000,00)	(100,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
	JUMLAH	27.134.717.700,00	38.584.526.552,00	63.061.445.715,00	58.780.689.967,00	26.379.139.213,00	331.603.426.471,00	142.706.494.342,00	500.689.060.026,00	58.091.629.941,00)	-10,4

WALIKOTA PAREPARE,
ttd
TAUFAN PAWE

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
 KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
 KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Tahun Anggaran 2020

Hal 1 dari 2

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
01.	PELAYANAN UMUM	130.249.590.459,00	122.981.649.674,00	(7.267.940.785,00)	(5,58)
01.2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.237.646.000,00	5.311.626.000,00	(926.020.000,00)	(14,85)
01.2.14.	STATISTIK	110.000.000,00	94.324.000,00	(15.676.000,00)	(14,25)
01.2.15.	PERSANDIAN	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)
01.2.18.	KEARSIPAN	110.750.000,00	110.750.000,00	-	-
01.4.01.	PERENCANAAN	4.752.951.500,00	4.219.081.500,00	(533.870.000,00)	(11,23)
01.4.02.	KEUANGAN	24.024.976.064,00	22.329.880.064,00	(1.695.096.000,00)	(7,06)
01.4.03.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.247.898.400,00	3.875.965.400,00	(2.371.933.000,00)	(37,96)
01.4.06.	PENGAWASAN	2.242.991.000,00	1.628.508.000,00	(614.483.000,00)	(27,40)
01.4.08.	KEWILAYAHAN	10.635.988.695,00	9.216.212.695,00	(1.419.776.000,00)	(13,35)
01.5.01.	SEKRETARIAT DAERAH	44.376.570.000,00	45.052.850.265,00	676.280.265,00	1,52
01.5.02.	SEKRETARIAT DPRD	31.469.818.800,00	31.122.451.750,00	(347.367.050,00)	(1,10)
02.	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	12.099.632.811,00	10.418.930.206,00	(1.680.702.605,00)	(13,89)
02.1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.464.832.811,00	9.179.730.206,00	(1.285.102.605,00)	(12,28)
02.4.10.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1.634.800.000,00	1.239.200.000,00	(395.600.000,00)	(24,20)
03.	EKONOMI	38.356.447.690,00	32.629.709.658,00	(5.726.738.032,00)	(14,93)
03.2.01.	TENAGA KERJA	1.765.473.500,00	1.292.253.500,00	(473.220.000,00)	(26,80)
03.2.03.	PANGAN	1.287.631.219,00	996.833.719,00	(290.797.500,00)	(22,58)
03.2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.510.337.500,00	15.771.230.950,00	260.893.450,00	1,68
03.2.09.	PERHUBUNGAN	2.754.450.000,00	2.469.574.100,00	(284.875.900,00)	(10,34)
03.2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.374.708.000,00	1.127.908.000,00	(246.800.000,00)	(17,95)
03.2.12.	PENANAMAN MODAL	3.261.800.000,00	1.921.850.000,00	(1.339.950.000,00)	(41,08)
03.3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.481.481.000,00	2.003.671.850,00	(477.809.150,00)	(19,25)
03.3.03.	PERTANIAN	3.227.800.471,00	2.791.281.539,00	(436.518.932,00)	(13,52)
03.3.06.	PERDAGANGAN	6.054.666.000,00	3.908.556.000,00	(2.146.110.000,00)	(35,45)
03.3.07.	PERINDUSTRIAN	638.100.000,00	346.550.000,00	(291.550.000,00)	(45,69)
04.	LINGKUNGAN HIDUP	31.339.645.600,00	22.532.236.225,00	(8.807.409.375,00)	(28,10)
04.2.04.	PERTANAHAN	9.780.000.000,00	4.680.000.000,00	(5.100.000.000,00)	(52,15)
04.2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	21.559.645.600,00	17.852.236.225,00	(3.707.409.375,00)	(17,20)
05.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	82.833.643.000,00	72.003.931.426,00	(10.829.711.574,00)	(13,07)
05.1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.879.733.000,00	56.847.046.851,00	(12.032.686.149,00)	(17,47)
05.1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.953.910.000,00	15.156.884.575,00	1.202.974.575,00	8,62
06.	KESEHATAN	180.657.202.320,00	168.267.430.663,00	(12.389.771.657,00)	(6,86)
06.1.02.	KESEHATAN	175.380.738.320,00	163.777.499.663,00	(11.603.238.657,00)	(6,62)
06.2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.276.464.000,00	4.489.931.000,00	(786.533.000,00)	(14,91)
07.	PARIWISATA DAN BUDAYA	10.702.584.000,00	8.542.870.000,00	(2.159.714.000,00)	(20,18)
07.2.16.	KEBUDAYAAN	3.905.000.000,00	3.720.000.000,00	(185.000.000,00)	(4,74)
07.3.02.	PARIWISATA	6.797.584.000,00	4.822.870.000,00	(1.974.714.000,00)	(29,05)

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
08.	PENDIDIKAN	57.648.984.750,00	49.544.678.987,00	(8.104.305.763,00)	(14,06)
08.1.01.	PENDIDIKAN	47.595.431.500,00	41.976.212.737,00	(5.619.218.763,00)	(11,81)
08.2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.997.154.000,00	5.902.724.000,00	(2.094.430.000,00)	(26,19)
08.2.17.	PERPUSTAKAAN	1.423.899.250,00	1.213.092.250,00	(210.807.000,00)	(14,80)
08.4.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	632.500.000,00	452.650.000,00	(179.850.000,00)	(28,43)
09.	PERLINDUNGAN SOSIAL	14.892.959.337,00	13.767.623.187,00	(1.125.336.150,00)	(7,56)
09.1.06.	SOSIAL	9.221.901.520,00	9.176.523.320,00	(45.378.200,00)	(0,49)
09.2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.879.717.600,00	2.310.299.400,00	(569.418.200,00)	(19,77)
09.2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.791.340.217,00	2.280.800.467,00	(510.539.750,00)	(18,29)
JUMLAH		558.780.689.967,00	500.689.060.026,00	(58.091.629.941,00)	(10,40)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 OKTOBER 2020

KOTA PAREPARE
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH PNS DAERAH MENURUT GOLONGAN

JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET	NO	ESELON	JUMLAH	TERISI	LOWONG
1	I	16		1	II-A	-	1	-
2	II	444		2	II-B	-	21	-
3	III	2,121		3	III-A	-	45	-
4	IV	1,081		4	III-B	-	73	-
5	Pejabat Negara	2		5	IV-A	-	287	-
	JUMLAH	3,811		6	IV-B	-	74	-
					JUMLAH	-	500	-

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 OKTOBER 2020

DAFTAR PIUTANG DAERAH

No.	Uraian	Keterangan	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang Tahun 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang 2019	Jumlah Penyisihan
1	PIUTANG PAJAK			2,523,525,803.00	1,871,405,443.00	1,331,642,833.00	3,063,288,413.00	512,127,186.22
A	HOTEL	No. Ketetapan		95,066,650.00	44,257,700.00	58,119,450.00	81,204,900.00	26,098,308.50
B	RESTORAN			761,870,631.00	443,639,026.00	164,400,900.00	1,041,108,757.00	125,073,543.23
C	HIBURAN			97,496,250.00	166,404,761.00	8,040,200.00	255,860,811.00	15,795,368.81
D	REKLAME			536,281,000.00	120,210,000.00	99,565,000.00	556,926,000.00	319,014,050.00
E	PAJAK PENERANGAN JALAN			999,095,205.00	1,082,746,664.00	999,095,205.00	1,082,746,664.00	5,413,733.32
1	PAJAK PENERANGAN JALAN		2017	-			-	-
2	PAJAK PENERANGAN JALAN		2018	999,095,205.00		999,095,205.00	-	-
3	PAJAK PENERANGAN JALAN		2019	-	1,082,746,664.00		1,082,746,664.00	5,413,733.32
F	TAMBANG GALIAN C			19,444,787.00	-	-	19,444,787.00	10,891,825.10
G	PAJAK AIR BAWAH TANAH			14,271,280.00	1,947,292.00	2,422,078.00	13,796,494.00	9,778,357.26
H	PAJAK BURUNG WALET			-	12,200,000.00	-	12,200,000.00	61,000.00
1	KAHAR HARYONO THAMRIN	750	2019		1,500,000.00		1,500,000.00	7,500.00
2	H YUNUS	752	2019		500,000.00		500,000.00	2,500.00
3	H YUNUS	753	2019		500,000.00		500,000.00	2,500.00
4	BURHAN / PERC DUNIA	831	2019		1,700,000.00		1,700,000.00	8,500.00
5	H IBRAHIM	1231	2019		300,000.00		300,000.00	1,500.00
6	HOEI HARIANTO	1232	2019		200,000.00		200,000.00	1,000.00
7	MUH NUR	1279	2019		500,000.00		500,000.00	2,500.00
8	KAHAR HARYONO THAMRIN	1282	2019		300,000.00		300,000.00	1,500.00
9	KAHAR HARYONO THAMRIN	1283	2019		1,200,000.00		1,200,000.00	6,000.00
10	ROBERT W / TOKO JUJUR	1307	2019		1,500,000.00		1,500,000.00	7,500.00
11	HERMAN /TOKO SAHABAT	1353	2019		600,000.00		600,000.00	3,000.00
12	FENNY	1885	2019		1,000,000.00		1,000,000.00	5,000.00

No.	Uraian	Keterangan	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang Tahun 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang 2019	Jumlah Penyisihan
13	RICKY /TOKO MATAHARI MOTOR	1886	2019		2,250.000.00		2,250.000.00	11,250.00
14	INDRIANI TJEN	1888	2019		150.000.00		150.000.00	750.00
	Jumlah			2,523,525,803.00	1,871,405,443.00	1,331,642,833.00	3,063,288,413.00	512,127,186.22

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL 20 OKTOBER 2020

**RINCIAN PENYERTAAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Jenis	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	56,085,049,532.86	3,855,425,126.14	2,974,466,443.60	56,966,008,215.40
1	PT. Pares Bandar Madani	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00
2	PDAM Kota Parepare	54,585,049,532.86	3,855,425,126.14	2,974,466,443.60	55,466,008,215.40
	Investasi Permanen Lainnya	22,897,000,000.00	5,250,000,000.00	-	28,147,000,000.00
3	PT. Bank Sulselbar	22,897,000,000.00	5,250,000,000.00	-	28,147,000,000.00
	Jumlah	78,982,049,532.86	9,105,425,126.14	2,974,466,443.60	85,113,008,215.40

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE